

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2009 ini kiranya dapat dijadikan sebagai barometer pengukuran kinerja pemerintah khususnya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi untuk semakin mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki demi kebaikan pelaksanaan tugas di masa-masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2009 akan memiliki banyak kekurangan dan jauh dari harapan sehingga kami harapkan agar seluruh pihak terkait berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan bersama.

Sukabumi, Januari 2010
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI

HARDI HARPAN, Sm.Hk.
PEMBINA
NIP. 19581008 198303 1 020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2009, secara umum Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi adalah arah dan tolok ukur yang jelas dari rumusan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Aparatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi, sehingga dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya akuntabilitas kinerja yang lebih jelas dan terukur.

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi serta indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2009.

Hasil evaluasi pencapaian sasaran terhadap 7 sasaran mencakup 7 indikator sasaran ternyata dapat diketahui bahwa seluruhnya tercapai dengan baik (100%). Adapun 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya pengetahuan kader Ormas, LSM, OKP dan Parpol hanya tercapai sebesar 53% hal tersebut lebih dikarenakan pencapaian sasaran tergantung pada permintaan pihak provinsi/Bakorwil dalam hal pengiriman peserta dimana telah dipersiapkan sebanyak 280 Orang namun hanya terealisasi 148 Orang. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan pengiriman peserta sebagaimana dimaksud telah memenuhi seluruh permintaan baik dipihak Provinsi maupun Bakorwil. Dengan kata lain, pelaksanaan kegiatan mencapai 100% (Efektif).

Sedangkan hasil analisis terhadap 28 kegiatan, dimana sebanyak 16 kegiatan adalah Program Administrasi Perkantoran dimana rata-rata pencapaian targetnya 79,16% dan 12 Kegiatan dengan rata-rata pencapaian targetnya sebesar 88,8%.

Tujuh sasaran dengan 7 indikator sasaran mengacu kepada 4 tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2009 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari 4 misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi.

Rincian lebih lanjut dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. misi pertama terdiri dari 1 tujuan dan 4 sasaran
- b. misi kedua terdiri dari 1 tujuan dan 1 sasaran
- c. misi ketiga terdiri 1 tujuan dan 1 sasaran
- d. misi keempat terdiri dari 1 tujuan dan 1 sasaran

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dengan segenap bantuan dari seluruh pihak yang terkait demi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2009 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, dan Outcomes*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Kantor Kesbang, Politik dan Linmas ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2009.

Dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2009 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Sukabumi.
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 1)
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 10)
15. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LAKIP ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun anggaran 2007.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi No. 33 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kantor adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kantor menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Kantor

1. Membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat baik dalam perumusan kebijakan umum maupun kebijakan teknis;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Kantor;
3. Membuat rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
4. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
5. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai dilingkungan kantor dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
6. Melaksanakan pengembangan kegiatan kesatuan bangsa, Politik, dan perlindungan masyarakat;
7. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
8. Memberi saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang kesatuan bangsa, Politik, dan perlindungan masyarakat yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah
9. Menyelenggarakan pelayanan di bidang kesatuan bangsa, Politik, dan perlindungan masyarakat;
10. Mempertanggung jawabkan tugas Kantor secara teknis operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
11. Mempertanggung jawabkan tugas Kantor secara teknis administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. Pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Kantor yang meliputi administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;

3. Penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kantor
4. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas kantor secara terpadu;
5. Penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kantor;
6. Pengumpulan peraturan-peraturan di bidang kesatuan bangsa, Politik, dan perlindungan masyarakat;
7. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris kantor;
8. Pembinaan dan Pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
10. Pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
11. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
12. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Kesatuan Bangsa

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesatuan Bangsa;
- b. Menyiapkan data penduduk berdasarkan suku, agama dan ras sebagai bahan penyusunan program kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi materi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan kesatuan bangsa kepada masyarakat;
- d. Melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya integrasi dan kesatuan bangsa;
- e. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembauran, ketahanan nasional, pelaksanaan demokratisasi, dan wawasan kebangsaan;
- f. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Seksi Sosial Politik, dan Hubungan Antar Lembaga

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sosial Politik, dan Hubungan antar Lembaga;
- b. Menyiapkan data pimpinan lembaga pemerintah, organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan organisasi Politik, serta masalah strategis Daerah bidang ideologi, Politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan agama;
- c. Melakukan pemantauan kegiatan dan pengkajian terhadap dampak kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan organisasi Politik, serta masalah strategis Daerah bidang ideologi, Politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan agama;
- d. Melaksanakan penanganan dan koordinasi masalah yang timbul antar lembaga dan masalah strategis Daerah;
- e. Melakukan pemantauan kegiatan penyelenggaraan Pemilu di Daerah;
- f. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Seksi Perlindungan Masyarakat

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengolahan data sumber daya manusia atau potensi satuan perlindungan masyarakat yang ada di setiap kecamatan/ kelurahan/ kantor/ dinas/ instansi/ lembaga/ perusahaan;
- c. Penyusunan program pendidikan latihan dasar (Diklatsar) perlindungan masyarakat;
- d. Penyiapan materi dan penyelenggaraan pendidikan latihan dasar (Diklatsar) perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian keamanan lingkungan terhadap potensi satuan perlindungan masyarakat;
- f. Membantu pelaksanaan pengamanan kegiatan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- g. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

- h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi melakukan konsultasi, koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai Dinas/Instansi internal, eksternal, vertikal maupun horizontal untuk semakin meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas dimaksud.

BAB II
RENCANA STRATEGIS
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KOTA SUKABUMI

A. Visi dan Misi

Visi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi adalah “terciptanya Sistensi dan Kondisi yang Demokratis Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 Dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Bermasyarakat dan Beragama”

Dimana stabilitas situasi dan kondisi yang demokratis dalam berbagai aspek kehidupan dimaksud diharapkan dapat tercipta dengan baik hingga kurun waktu sampai dengan tahun 2013 melalui Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat diwujudkan melalui tahapan-tahapan cara yang ditempuh (Misi) sehingga dengan demikian dapat kami sampaikan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan mewujudkan kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat yang kondusif di Wilayah Kota Sukabumi;
2. Mewujudkan suasana yang harmonis antara Aparatur Perangkat Daerah, DPRD dan Masyarakat;
3. Memberdayakan Potensi organisasi sosial kemasyarakatan, memfasilitasi organisasi kepemudaan dan Partai Politik;
4. Menempatkan pelayanan dibidang Pemeliharaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi sebagaimana disebutkan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat.
2. Menjalin suasana yang kondusif antara Aparat, Masyarakat dan DPRD.
3. Menginventarisasi Kegiatan –kegiatan Ormas, LSM, OKP dan Parpol.
4. Menjalin hubungan yang kondusif antara aparat dengan Ormas, LSM, OKP dan Parpol.
5. Mewujudkan Pelayanan yang optimal dan prima kepada seluruh lapisan masyarakat.
6. Meningkatkan kemampuan /kualitas SDM bagi seluruh personil yang ada.
7. Meningkatkan Kemampuan SDM Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kota Sukabumi.

Seiring dengan penerapan strategi diatas, maka perlu dirumuskan langkah-langkah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Daerah
2. Fasilitasi Forum Komunikasi Umat Beragama
3. Pelaksanaan Seminar/ Tok Show/ Seminar wawasan Kebangsaan
4. Pengiriman Peserta Pendidikan Politik dan pelaksanaan Pendidikan Politik di Tingkat Kota
5. Pembinaan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

C. Prioritas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi

Melalui pelaksanaan Program-program yang dilaksanakan selaras dengan Visi Walikota Sukabumi Preode 2008-2013 Yaitu “ Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera (dilandasi Nilai Pilosopis Sidik, Amanah dan Fatonah)” dimana Pemerintahan yang amanah dan berpara digma surgawi memiliki konsekwensi bahwa segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemeintah Kota Sukabumi harus diarahkan sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat dengan memilki pola pikir dan pola tindak yang didasarkan pada Norma-norma Agama, Hukum dan sosial.

Memperhatikan gambaran rencana pembangunan khususnya dalam misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dalam pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi dapat diketahui

bahwa kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi mengemban tugas penting yang sangat berat baik secara langsung maupun tidak langsung guna mendukung capaian dari setiap tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Disamping program –program dimaksud perlu adanya program prioritas dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana Strategi (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan selaras dengan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 dengan sasaran Peningkatan ketertiban dan perlindungan serta kedisiplinan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam rangka memelihara dan mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama melalui pembinaan dan pelatihan anggota linmas dalam upaya peningkatan pemahaman anggota terhadap kelinmasan serta mengagendakan pelaksanaan rangkaian acara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional agar berjalan dengan tertib dan aman.

2. Program Pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal

Melalui koordinasi serta pelaksanaan intelijen daerah bersama unsur terkait bersinergi melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan melalui metode temu cepat, lapor cepat dan tindak cepat dengan memperhatikan aspek-aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan hubungan yang harmonis antara masyarakat, aparatur perangkat daerah dan DPRD yang diharapkan dapat berdampak secara signifikan terhadap peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya di Kota Sukabumi.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Membangun komunikasi antar masyarakat Kota Sukabumi yang memiliki keragaman dan meningkatkan peran dan fungsi agar dapat secara aktif mengatasi masalah masalah sosial melalui fungsi-fungsi dan peran sebagai fasilitator, mediator dan stimulator

dalam meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup beragama sehingga berdampak pada peningkatan optimalisasi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan etika, budaya, aturan Hukum dan agama yang diyakini oleh masing-masing umat beragama melalui peningkatan toleransi umat beragama.

4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan

Meningkatkan kesadaran berbangsa dan wawasan Kebangsaan dengan memupuk pemahaman ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan pemahaman nilai-nilai sejarah kebangsaan guna menumbuhkan semangat nasionalisme sejak dini pada masyarakat khususnya yang usia rentan di tengah derasnya arus informasi dan teknologi pada era globalisasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan khususnya di kalangan pelajar.

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat serta partisipasi politik masyarakat melalui pengiriman peserta pendidikan politik dan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat Kota Sukabumi dimana dapat kami sampaikan secara umum bahwa peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan indikator capaian perolehan suara sah dalam pelaksanaan Pemilu khususnya di Kota Sukabumi akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan politik di Indonesia.

Disamping sasaran tersebut diatas, Peningkatan informasi data LSM, OKP, Ormas dan Parpol juga merupakan salah satu sasaran Program Pendidikan Politik dimana eksistensi LSM, OKP, Ormas dan Parpol tersebut sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman politik masyarakat.

Hal ini dapat dipahami sebagai korelasi hubungan Parpol dalam pengembangan rekrutmen simpatisan melalui pengembangan organisasi-organisasi sayap dimana LSM, OKP dan Parpol yang mau tidak mau akan memiliki andil dalam arah dan kebijakan Parpol meski secara jelas disampaikan bahwa LSM, OKP, dan Ormas bukan merupakan *underbow* Partai Politik tertentu. Sehingga validitas data yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi idealnya memiliki akurasi yang *up to date* sehingga dinamika perkembangan masyarakat dalam berorganisasi dapat dimonitor dengan baik yang pada gilirannya perwujudan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi sebagai pelaksana kewenangan dimaksud menjadikan program bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai prioritas program OPD dimana ketepatan alokasi dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud dapat diawasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

D. Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di

dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2009 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2009 ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2009.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact*.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- **Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)**
- **Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)**

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- **80 – 100 = Baik**
- **50 - 79 = Cukup**
- **< 50 = Kurang**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

➤ **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

- Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Secara umum Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013. Dari 4(empat) Misi yang ditetapkan, sebanyak 7 (tujuh) sasaran telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013.

Sebelum memasuki pembahasan pelaksanaan evaluasi dalam rangka analisis pencapaian sasaran, perlu kami sampaikan bahwa target dan realisasi sasaran yang ditetapkan pada tahun 2008 tidak dapat kami isi mengingat adanya perubahan nomenklatur dimana pada tahun 2008, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi masih merupakan Bidang dalam lingkup Dinas Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa Kota Sukabumi. Sehingga melalui perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi No. 33 Tahun 2008, Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru baik secara struktur maupun fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 merupakan tanggung jawab dan kewajiban Dinas Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa yang melekat kepadanya dan tidak ada kewajiban pimpinan SKPD dimaksud untuk mempertanggungjawabkan serta memberikan penjelasan kepada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi. Dengan kata lain, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi memulai seluruh perencanaan kegiatan dari angka 0 (nol). Adapun uraian lebih lanjut sesuai dengan RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1 adalah Meningkatnya Kesadaran Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat dapat kami tampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Pelajar yang mengikuti Orientasi Wawasan Kebangsaan	Orang	-	-	120	120	100

Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa dalam pelaksanaan Orientasi Wawasan Kebangsaan melalui kebijakan pelaksanaan diskusi wawasan kebangsaan yang diterapkan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi dengan sasaran pelajar SMA/ sederajat telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 120 siswa dari 35 SMA/ sederajat dimana pada pelaksanaannya telah menghasilkan kader Wawasan Kebangsaan dikalangan pelajar SMA/ sederajat sebanyak 120 Orang.

Dapat kami sampaikan bahwa dari tabel diatas menunjukkan realisasi akumulasi yang positif karena indikator terpenuhi 100% atau bermakna baik.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan Diskusi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 menargetkan 120 orang peserta yang mewakili 35 SMA/ sederajat dengan materi sebagai berikut :

1. Implementasi UU No. 32 Tahun 2004
2. Pemahaman Bela Negara
3. Kebijakan dan Strategi Pembinaan Kesatuan Bangsa
4. Peran Kepolisian dalam Pengamanan
5. Diskusi Kelompok.

Pelaksanaan Diskusi Wawasan Kebangsaan dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Agustus 2009 bertempat di Hotel Permata Hijau dengan 2 (dua) sesi kegiatan, Pemberian Materi dan Pelaksanaan Diskusi.

2. Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2 adalah Meningkatnya Ketertiban dan Perlindungan serta kedisiplinan masyarakat dapat kami tampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Presentase Jumlah Linmas Terlatih terhadap Jumlah Anggota Linmas	%	-	-	10.95	10.95	100

Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa dalam pelaksanaan Peningkatan ketertiban dan Perlindungan serta Kedisiplinan Masyarakat melalui kebijakan pelaksanaan Pembinaan Anggota Linmas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diterapkan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi dengan sasaran Anggota Linmas Kota Sukabumi telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 210 Orang dari Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Sukabumi dimana pada pelaksanaannya diisi dengan materi sebagai berikut :

1. Sejarah Perubahan Nama HANSIP menjadi LINMAS
2. Permendagri No. 10 Tahun 2009
3. Siskamswakarsa dalam memantapkan Kamtibmas

4. PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
5. Peran Pol. PP dalam Penegakan Perda
6. Latihan Tata Cara Pelaksanaan Apel dan Upacara
7. Latihan Baris Berbaris

Dapat kami sampaikan pula bahwa dari tabel diatas menunjukkan realisasi akumulasi yang positif karena indikator terpenuhi 100% atau bermakna baik.

Adapun pada pelaksanaannya, Peserta dikonsentrasikan di tingkat kecamatan dengan masing-masing 3 (tiga) hari pelaksanaan Kegiatan dan jumlah peserta sebanyak 30 Orang. Penyelenggaraan Pembinaan Linmas ini dilaksanakan pada tanggal 9 November s/d 23 Desember 2009.

3. Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3 adalah Meningkatnya Kesadaran berpolitik masyarakat dapat kami tampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Peserta Penyuluhan Politik	Orang	-	-	420	420	100

Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa dalam pelaksanaan Penyuluhan Politik melalui kebijakan pelaksanaan Penyuluhan Politik bagi masyarakat yang diterapkan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi dengan sasaran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda, dan Organisasi Wanita telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 420 Orang.

Dapat kami sampaikan bahwa dari tabel diatas menunjukkan realisasi akumulasi yang positif karena indikator terpenuhi 100% atau bermakna baik.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat hanya merupakan fasilitasi dan sosialisasi tentang peraturan yang

terkait dengan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia sehingga diharapkan pemahaman / pengetahuan masyarakat dapat meningkat dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi khususnya di Kota Sukabumi. Adapun materi yang disampaikan pada kesempatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi UU No. 32 Tahun 2004
2. Cegah tanggal rekrutmen aksi terorisme
3. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Sosialisasi Peraturan Pemilu

Pelaksanaan Penyuluhan Politik dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober s/d 5 November 2009 di 7 (tujuh) Kecamatan se- Kota Sukabumi.

4. Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4 adalah Meningkatkan Aktivitas dan toleransi dalam kehidupan beragama ditampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	Orang	-	-	15	15	100

Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama terlaksana melalui kegiatan kegiatan rapat koordinasi, konsultasi dan silaturahmi yang di fasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Masyarakat Kota Sukabumi

Dapat kami sampaikan bahwa dari tabel diatas menunjukkan realisasi akumulasi yang positif karena indikator terpenuhi 100% atau bermakna baik.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Forum Kominukasi Umat beragama ini agar seluruh umat beragama umat beragama saling menghargai dan menghormati di dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan masing-masing, dengan

diadakannya Forum Kerukunan Umat Beragama ini diharapkan tidak terjadi adanya konflik antar umat beragama di Kota Sukabumi, adapun unsur-unsur keagamaan yang tergabung ke dalam Forum Kerukunan Umat beragama ini adalah unsur MUI, UN, PUI, Protestan Katholik , BKGS, Muhammadiyah, Khatholik, Budha, Hindu dan Masyarakat Tiong Hoa. Saat ini, Kedudukan Sekretariat FKUB berada di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Jalan Lettu bakri No. 20 Kota Sukabumi

Pada Pelaksanaannya, kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Sukabumi secara umum dapat kami simpulkan kedalam agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Kerja
2. Rapat Koordinasi
3. Rapat Konsultasi

Disamping kegiatan-kegiatan tersebut diatas, FKUB melaksanakan Kegiatan monitoring, Pertemuan, Silaturahmi antar pengurus dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan Toleransi Umat Beragama lainnya.

5. Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5 adalah Meningkatnya Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa ditampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Hari	-	-	15	15	100

Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa pelaksanaan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah guna meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Khususnya Kota Sukabumi dilaksanakan secara priori setiap bulannya melalui kegiatan rapat koordinasi dan melakukan rapat konsultasi/evaluasi setiap 4(empat)bulan sekali bersama dengan unsur Dewan Pembina Kominda Kota Sukabumi.

Dapat kami sampaikan bahwa dari tabel diatas menunjukkan realisasi akumulasi yang positif karena indikator terpenuhi 100% atau bermakna baik.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) ini mengacu kepada Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2002 tentang pengkoordinasian operasi dan kegiatan Intelijen seluruh Instansi dalam rangka Diteksi Dini ATHG terhadap stabilitas Nasional NKRI. Kegiatan ini perlu juga dilaksanakan sebagai upaya mempermudah pelaksanaan Koordinasi, penghimpun data, dan fakta yang terjadi diwilayah Kota Sukabumi yang berkaitan dengan isu-isu strategis menyangkut Keamanan dan Ketertiban, dimana kegiatan-kegiatan Kominda sampai saat ini masih berkesinambungan dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi dan mengantisipasi berbagai keamanan di Kota Sukabumi, sehingga pelaksanaan Siskamswakarsa di Kota Sukabumi lebih meningkat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kominda Kota Sukabumi lebih terfokus kedalam kegiatan-kegiatan koordinasi, monitoring, surveylance, dan pengolahan informasi yang berkaitan dengan Ipoleksosbud Hankam dan Ag.

6. Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 5 adalah Meningkatnya Pengetahuan Kader Ormas, LSM, OKP dan Partai Politik ditampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Pengiriman Peserta, Pasilitasi, Simposium dan Seminar dll	Orang	-	-	280	148	53

Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa pada Tahun 2009 ini ditargetkan 280 peserta yang sediannya mengikuti Pendidikan/ Pelatihan/ Seminar/Lokakarya yang dilaksanakan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Bakorwil, hanya terealisasi 148 orang sehingga capaian kinerja hanya mencapai 53 %. Hal ini dikarenakan target pengiriman peserta yang diasumsikan sebanyak 7

orang dalam 40 kegiatan (280 OK) terlalu besar dari permintaan baik di tingkat Pusat, Bakorwil maupun Provinsi.

Secara umum bahwa penyelenggaraan Pembinaan/Pelatiha/Simposium dalam rangka pembinaan terhadap Ormas, LSM, OKP dan Parpol didasarkan pada Radiogram/ Surat permohonan peserta yang dikirimkan oleh pihak penyelenggaran (Pusat, Bakorwil dan Provinsi) sehingga kadang-kadang realisasi penyelenggaraan kegiatan berbeda dengan asumsi (target) yang telah direncanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi.

Seperti yang terlihat dalam tabel, capaian kinerja tahun 2009 adalah 53% hal ini termasuk dalam katagori cukup.

7. Evaluasi Pencapaian Sasaran 7

Sasaran 7 adalah Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ditampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran	%	-	-	75	75	100%

Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Pemeliharaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Sukabumi dalam pelaksanaan Administrasi Perkantoran meliputi ketata usahaan, pengelolaan rumah tangga, pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pendayagunaan, pengembangan kesejahteraan pegawai dan penyediaan sarana dan prasarana kantor

Dapat kami sampaikan bahwa dari tabel diatas menunjukkan realisasi akumulasi yang positif karena indikator terpenuhi 100% atau bermakna baik.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan administrasi perkantoran untuk menunjang kegiatan sehari-hari seperti surat-menyurat perkantoran, dan administrasi umum lainnya.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Surat-menyurat
2. Jasa komunikasi
3. Jasa Administrasi Keuangan
4. Jasa Kebersihan kantor
5. Jasa Perbaikan alat kerja

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah diberikan sejumlah kewenangan dalam urusan pemerintahan untuk mengelola sumber-sumber keuangan dalam membiayai jalannya roda pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Konkritnya, berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, daerah harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki dan dipergunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan kemampuan, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Penerapan prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Adapun target dan realisasi keuangan pada kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Target dan realisasi anggaran

Pada pelaksanaan kegiatan anggaran yang diterima pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 3.931.179.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.797.670.389. atau sebesar 71,17%.

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa anggaran yang diterima oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi sebesar Rp. 3.931.179.000,- terbagi kedalam Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) dan Belanja Langsung (Kegiatan) dengan perincian, sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi yang dialokasikan sebesar Rp. 1.239.109.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 608.196.563,- atau sebesar 49,08 % hal ini disebabkan terjadinya pengurangan Pegawai di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi akibat adanya perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi yang pada mulanya masih menginduk kepada Dinas Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang dialokasikan sebesar Rp. 2.692.070.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.189.473.826,- atau 81.33 %. Adapun perincian belanja langsung dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.854.014.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.521.063.000,- atau 82,04 %
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 750.906.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 587.795826,- atau 78,28 %

- Belanja Modal Rp. 87.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 800.615.000,- atau 92,50 %

2. Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan lebih disebabkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang senantiasa berubah tanpa memperhatikan kesiapan aparatur pengelolaan keuangan SKPD dimana dapat kami sampaikan bahwa secara umum pegawai dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi tidak ada satupun yang memiliki latar belakang disiplin pendidikan Akuntansi.

Menyikapi hal tersebut, kiranya perlu adanya pengalokasian pegawai untuk Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi yang memiliki keahlian dibidang Akuntansi.

D. Analisis Efisiensi dan efektivitas Kinerja Kegiatan

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Sukabumi dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Adapun Efektifitas adalah perbandingan antara Rasio dan perbandingan outcam dengan rasio pencapaian output dari suatu kegiatan suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcam sama melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output.

Sedangkan inefektif disebabkan pencapaian outcam lebih rendah dari pada pencapaian output.

Secara umum Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi pada tahun 2009 adalah sebanyak 9 (Sembilan) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Adapun analisis efisiensi kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Analisis Efisiensi dan efektifitas Kegiatan 1

Kegiatan 1 adalah Kegiatan jasa surat menyurat dapat kami tampilkan dalam tabel analisis efisiensi dan efektifitas kegiatan sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi tentunya akan ada banyak hal yang mempengaruhi arah dan kebijakan serta capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2009.

Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi tentunya harus dapat dievaluasi pada penyelenggaraan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi bukanlah merupakan keberhasilan individu yang diraih tanpa adanya dukungan dan partisipasi seluruh unsur terkait sehingga kerjasama yang baik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2009 ini kiranya dapat dipertahankan dan secara bertahap ditingkatkan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat semakin meningkat yang kemudian bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sukabumi khususnya dan secara umum keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi tahun 2009 ini tentunya belum dapat memenuhi harapan dan keinginan seluruh pihak terkait yang tak lepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi. Kiranya saran dan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi tahun 2009 ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.

Sukabumi, Januari 2010
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI

HARDI HARPAN,Sm,Hk
Pembina
NIP. 19581008 198303 1 020

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
KOTA SUKABUMI TAHUN 2009**

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5		6	7	8
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat - Materai - perangko - kartu Lebaran	115 Lbr 50 Lbr 50 Lbr	Terselenggaranya Surat menyurat Informasi dan laporan	Jasa Surat Menyurat	Input : SDM Dana Output : Terkirimnya Informasi dan Laporan melalui jasa surat menyurat Outcome : Menunjang kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kantor	Lembar Rp. 8.25.000,- Lembar	Bag Tu
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Telepon - Air - Listrik	1 Smbgan 1 Smbgan 1 Smbgan	Menunjang terlaksananya kegiatan kantor	Terwujudnya Jasa Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Sumbangan Rp. 7.920.000,- Orang Sumbangan	Bag Tu
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (TKK)	Terbayarnya gaji dan tunjangan kepada TKK	10 orang	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan (TKK)	Jasa Administrasi Keuangan (TKK)	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Orang Rp. 122.280.000,- Orang	Bag Tu
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terperuhnya Peralatan Kebersihan Kantor - Sapu Injuk - Kain Pel - Tempat Sampah - Kamoceng	6 Buah 12 Buah 24 Buah 6 Buah	Terpenuhinya sarana Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Buah Rp. 832.000,- Orang Buah	Bag Tu

	<ul style="list-style-type: none"> - Sapu Lidi - Pembersih Lantai - Ember Plastik - Sikat Kloset - Asbak - Kapur Barus 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Buah 4 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 12 Buah 					
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pemeliharaan dan perawatan alat kerja <ul style="list-style-type: none"> - Keyboard, Mouse,CD - Printer - CPU - Monitor - Plesdis - Jasa Instal 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Buah 10 Buah 6 Buah 5 Buah 4 Buah 20 Buah 	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Buah Rp. 5.100.000,- Buah	Bag Tu
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75%	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Buah Rp. 9.050.000,- Buah	Bag Tu
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <ul style="list-style-type: none"> - Kop Surat - Amplop Dinas - Blanko SPPD - Kartu Penerus Disposisi - Photo Copy 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Rim 12 Dus 2 Rim 6 Buku 55 Lembar 	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	% Rp. 9.050.000,- %	Bag Tu
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <ul style="list-style-type: none"> - Lampu Neon 40 Watt - Lampu Pijar - Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> 24 Buah 24 Buah 240 Mtr 	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Buah Rp. 9.050.000,- Buah	Bag Tu

		<ul style="list-style-type: none"> - Lampu TL 40 Watt - Batu Batrei Alkalin kecil - Batu Baterai ABC besar - Batu Baterai Segi empat alkalin 	<ul style="list-style-type: none"> 24 Buah 48 Buah 48 Buah 24 Buah 						
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang -Undangan	<p>Tersediannya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suar Karya - Pikiran Rakyat - Radar Bogor - Kompas - Santana 	<ul style="list-style-type: none"> 1500 Explar 12 Buah 12 Buah 12 Buah 12 Buah 12 Buah 	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang-Undangan	<p>Input : SDM Dana</p> <p>Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor</p>	<p>Buah Rp. 3.300.000,- Buah</p>	Bag Tu
	10	Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minuman	100%	Penyediaan Makan dan Minum	Penyediaan Makan dan Minum	<p>Input : SDM Dana</p> <p>Output : Meningkatnya Kinerja Perkantor</p>	<p>% Rp. 30.840.000,- %</p>	Bag Tu
	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	<p>Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Daerah - Luar Daerah - Luar Daerah Propinsi Jawa barat 	100%	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi le luar daerah	<p>Input : SDM Dana</p> <p>Output : Meningkatnya Kinerja Perkantor</p>	<p>Orang Rp. 64.200.000,- Orang</p>	Bag Tu
B		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan lemari arsip - Pengadaan Filing Kabinet 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 4 Buah 2 Buah 	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	<p>Input : SDM Dana</p> <p>Output : Terpenuhinya Sarana dan Prasaran aparatur yang sesuai dengan Standar</p>	<p>Orang Rp. 12.000.000,- Orang</p>	Bag Tu

	<p>2 Pengadaan Mebelier</p>	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Mebelier - Meja - Kursi</p>	<p>40% 7 Buah 5 Buah</p>	<p>Pengadaan Mebelier</p>	<p>Pengadaan Mebelier</p>	<p>Input : SDM Dana Output : Terpenuhinya Sarana dan Prasaran aparatur yang sesuai dengan Standar</p>	<p>Orang Rp. 25.033.000,- Orang</p>	<p>Bag Tu</p>
	<p>3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p>	<p>Terpeliharanya Gedung Kantor</p>	<p>40%</p>	<p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p>	<p>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</p>	<p>Input : SDM Dana Output : Terpenuhinya Sarana dan Prasaran aparatur yang sesuai dengan Standar</p>	<p>Orang Rp. 25.033.000,- Orang</p>	<p>Bag Tu</p>
	<p>4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</p>	<p>Terwujudnya Kendaraan Dinas yang siap Pakai</p>	<p>100% 4 Unit</p>	<p>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional</p>	<p>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Dinas Operasional</p>	<p>Input : SDM Dana Output : Terpenuhinya Sarana dan Prasaran aparatur yang sesuai dengan Standar</p>	<p>Orang Rp. 62.440.000,- Orang</p>	<p>Bag Tu</p>
<p>C</p>	<p>Program peningkatan Disiplin Aparatur</p>							
	<p>1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan Pakaian seragam linmas dan pamtupnya</p>	<p>100% 40 Orang</p>	<p>Pengadaan Pakain Dinas beserta kelengkapannya</p>	<p>Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya</p>	<p>Input : SDM Dana Output : Tersedianya Pakaian seragam linmas, pakaian pamtup dan kelengkapannya</p>	<p>Orang Rp. 103.615.000,- Orang</p>	<p>Bag Tu</p>

D	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan							
	1 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Satuan Linmas yang memiliki aketerampilan kelinmasan	60% 210 orang	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Input : SDM Dana Output : Terbinanya Satuan Linmas di Kota Sukabumi	Orang Rp. 80.968.000,- Orang	Kasi Linmas
	2 Pengendalian Keamanan lingkungan	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilu dan Hari raya berjalan aman,tertib dan terkendali - Apel Siaga Persiapan Pemilu 2009 - Pengaman Hari Raya Idhul Fitri	100% 1.918 org	Pengendalian Keamanan lingkungan	Pengendalian Keamanan lingkungan	Input : SDM Dana Output : Terlaksananya Pemilu 2009 dan Hari Raya Idhul Fitri dengan aman,tertib dan terkendali	Orang Rp. 325.631.000,- Orang	Kasi Linmas
E	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal							
	1. Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban	100% 15 Hari	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka Siskaswakarsa di daerah	Input : SDM Dana Output : Meningkatnya Koordinasi Intelijen (KOMINDA)	Orang Rp. 110.170.000,- Orang	Kasi Sospol & Hubal
F	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
	1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	Meningkatnya toleransi antar umat beragama	50% 27 orang	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama (FKUB)	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Input : SDM Dana Output : Terselenggaranya Forum kerukunan antar umat beragama (FKUB)	Orang Rp. 55.060.000,- Orang	Kasi Kesbang

G	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Seminar/Talk show,Diskusi/Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Persatuan dan kesatuan antar Pelajar	50% 140 orang	Seminar/Talk Show,Diskusi/Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Seminar/Talk Show Diskusi/Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Input : SDM Dana Output : Terlaksananya diskusi wawasan kebangsaan bagi Pelajar	Orang Rp. 41.159.000,- Orang	Kasi Kesbang
H	Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 Penyuluhan kepada Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat - Terlaksananya Pendidikan Politik Masyarakat - Terlaksananya Pengiriman Peserta Pendidikan Politik masyarakat	50% 420 orang 280 Orang	Penyuluhan kepada Masyarakat	Penyuluhan kepada Masyarakat	Input : SDM Dana Output : Meningkatnya pengetahuan Politik masyarakat	Orang Rp. 106.178.000,- Orang	Kasi Sospol & Hubal

Sukabumi, Januari 2008

KEPALA KANTOR KESBANG, POLITIK DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KOTA SUKABUMI

HARDI HARPAN,Sm,Hk
 Pembina
 NIP. 19581008 198303 1 020

KET
9





—

4



—

5





6



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SUKABUMI TAHUN 2009

NO	SASARAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelaksanaan Seminar/Talk Show/Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Diskusi Wawasan Kebangsaan	Orang	120	120	100
2	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Jumlah Linmas terlatih terhadap jumlah anggota Linmas	%	10,95	10,95	100
3	Penyuluhan kepada Masyarakat	Jumlah peserta Penyuluhan Politik	Orang	420	420	100
4	Meningkatnya aktifitas dan toleransi dalam kehidupan beragama	Jumlah Peserta Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama	Orang	27	27	100
5	Meningkatnya Kordinasi dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Jumlah Kegiatan Intelijen Daerah (KOMINDA)	Hari	15	15	100

6	Meningkatnya Pengetahuan Kader Ormas, LSM, OKP dan Partai Politik	Jumlah Pengiriman peserta Fasilitasi ,Simposium,dan Seminar,DLL	Orang	280	148	53
7	Meningkatnya pelayanan dibidang kesatuan bangsa Politik dan linmas	Pesentase Pelaksanaan Kegiatan Adminstrasi Perkantoran	%	75	75	100

KETERANGAN

8

Dilaksanakan sesuai
dengan rencana

Terlatih 210 orang
anggota linmas

Tokoh agama, Tokoh
masyarakat, Pemuda dan
Organisasi wanita

Terlaksana dengan baik
melalui rapat Koordinasi,
Konsultasi dan
Silaturahmi

Terlaksana dengan baik
melalui rapat koordinasi,
konsultasi dan evaluasi
situasi daerah

pelaksanaan hanya
teralisasi sesuai dengan
permintaan sebanyak 42
kegiatan di Tingkat
Provinsi dan Bakorwil

Pelaksanaan Kegiatan
Administrasi
perkantoran dengan baik
sesuai dengan rencana

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SUKABUMI TAHUN 2009**

No	PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terselenggaranya Surat menyurat Informasi dan laporan	Jasa Surat Menyurat	Input : SDM Dana Output : Terkirimnya Informasi dan Laporan melalui jasa surat menyurat Outcome : Menunjang kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kantor	Lembar Rp. 8.25.000,- Lembar	215	160	81,21%
2	Menunjang terlaksananya kegiatan kantor	Terwujudnya Jasa Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Sumbungan Rp. 7.920.000,- Sumbungan	1	1	100%
3	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan (TKK)	Jasa Administrasi Keuangan (TKK)	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Orang Rp. 122.280.000,- Orang	10	0	-100%

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Terpenuhinya sarana Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Buah Rp. 832.000,- Buah	12	12	100%
5	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor	Jasa Perbaikan Per alatan Kerja	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	% Rp. 5.100.000,- %	75	75	100%
6	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Buah Rp. 9.050.000,- Buah	75	75	100%
7	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	% Rp. 9.050.000,- %	100	100	100%
8	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Buah Rp. 9.050.000,- Buah	100	100	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang-Undangan	Input : SDM Dana Output : Menunjang terlaksananya Kegiatan kantor	Bulan Rp. 3.300.000,- Bulan	12	12	100%
10	Penyediaan Makan dan Minum	Penyediaan Makan dan Minum	Input : SDM Dana Output : Meningkatnya Kinerja Perkantor	Dus Rp. 30.840.000,- Dus	920	488	64,31%
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi le luar daerah	Input : SDM Dana Output : Meningkatnya Kinerja Perkantor	% Rp. 64.200.000,- %	80	100	125%
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : SDM Dana Output : Terpenuhinya Sarana dan Prasaran aparatur yang sesuai dengan Standar	Buah Rp. 21.000.000,- Buah	6	6	100%
13	Pengadaan Mebelier	Pengadaan Mebelier	Input : SDM Dana Output : Terpenuhinya Sarpras aparatur sesuai standar	Buah Rp. 25.033.000,- Buah	12	9	75%

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Input : SDM Dana Output : Terpenuhinya Sarana dan Prasaran aparatur yang sesuai dengan Standar	% Rp. 25.033.000,- %	75	70	93%
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Dinas Operasional	Input : SDM Dana Output : Terpenuhinya Sarana dan Prasaran aparatur yang sesuai dengan Standar	Unit Rp. 62.440.000,- Unit	3	3	100%
16	Pengadaan Pakain Dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Input : SDM Dana Output : Tersedianya Pakaian seragam linmas, pakaian pamtup dan kelengkapannya	Orang Rp. 103.615.000,- Orang	40	40	100%
17	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Input : SDM Dana Output : Terbinanya Satuan Linmas di Kota Sukabumi	Orang Rp. 80.968.000,- Orang	210	210	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pengendalian Keamanan lingkungan	Pengendalian Keamanan lingkungan	Input : SDM Dana Output : Terlaksananya Pemilu 2009 dan Hari Raya Idhul Fitri dengan aman, tertib dan terkendali	Orang Rp. 325.631.000,- Orang	1918	1918	100%
19	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka Siskamswakarsa di daerah	Input : SDM Dana Output : Meningkatnya Koordinasi Intelijen (KOMINDA)	Hari Rp. 110.170.000,- Hari	15	15	100%
20	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama (FKUB)	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Input : SDM Dana Output : Terselenggaranya Forum kerukunan antar umat beragama (FKUB)	Orang Rp. 55.060.000,- Orang	27	27	100%
21	Seminar/Talk Show, Diskusi/ Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Seminar/Talk Show Diskusi/Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Input : SDM Dana Output : Terlaksananya diskusi wawasan kebangsaan bagi Pelajar	Orang Rp. 41.159.000,- Orang	140	140	100%
22	Penyuluhan kepada Masyarakat	Penyuluhan kepada Masyarakat	Input : SDM Dana Output : Meningkatnya pengetahu	Orang Rp. 106.178.000,- Orang	280 420	148 420	52,86% 100%

		an Politik masyarakat				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

KETERANGAN

9

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU
Tidak ada Tenaga
Kontrak Kerja
di Kesbang

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Bagian TU

Sat Linmas

Sat Linmas

Kominda

FKUB

Siswa SMA/sede
rajat

Tokoh Agama,
Tokoh Masy
LSM, OKP dan
Ormas

